

## **Analisis Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Puskesmas Era Covid-19 di Puskesmas Nambo Kota Kendari**

### *Analysis of the Budget Management and Performance of the Health Center in the Covid-19 Era at the Nambo Health Center, Kendari City*

**Sri Mulyani, Azlimin, Muhammad Ikhsan Akbar**

Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

Universitas Mandala Waluya

(mulyani0870@gmail.com, 085234189777)

#### **ABSTRAK**

Menurut studi awal persoalannya bagaimana pengelolaan keuangan Puskesmas Abeli perlu dikaji karena pandemi Covid-19 banyak merubah program kerja yang ada di puskesmas dan hal ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan puskesmas. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu deskriptif untuk bisa mengetahui adakah pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan di puskesmas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian evaluasi untuk memberikan masukan atau dukungan dalam pengambilan keputusan. Subjek penelitian adalah Puskesmas Nambo, dan objek dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana anggaran serta laporan dari keuangan Puskesmas Nambo tahun 2019-2021. Analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian pengelolaan anggaran puskesmas, didapatkan tingkat ekonomi 92,46%, tingkat efisiensi 131,90%, tingkat efektivitas 118,90%. Hasil uji fisher didapatkan  $p = 0,075 < (0,05)$ , sementara hasil uji  $R^2$  sebesar 0,234 (23,4%). Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan keuangan di Puskesmas Nambo ekonomis, efektif namun tidak efisien. Kemudian variabel persediaan obat, persediaan alat dan bahan kesehatan, persediaan alat dan bahan kedokteran gigi, dan persediaan alat dan bahan memiliki persentase pengaruh variabel sebesar 23,4% terhadap jumlah pasien, sedangkan variabel sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu tidak diperiksa.

**Kata Kunci :** Pengelolaan anggaran, kinerja, puskesmas

#### **ABSTRACT**

*As a public organization, the Primary Health Center (PHC) financial management must be transparent, beginning with the budget implementation and planning phases. The purpose of this study was to ascertain how PHC financial performance was affected by financial management. Evaluation research is the kind of research that is used to help make decisions or give advice. The budget management and financial reports for the Nambo Health Center from 2019 to 2021 are the subject of the research and the object of the study. Regression analysis was used for data analysis. The study's findings on PHC budget management revealed an economic level of 92.46 %, an efficiency level of 131.90 %, and an effectiveness level of 118.90 %. The  $R^2$  test yielded 0.234 (23.4 %) while the Fisher's test yielded  $p = 0.075 (0.05)$ . The study's conclusion is that the Nambo Health Center's financial management is efficient but not efficient. The variables of drug supplies, supplies of medical equipment and materials, supplies of dental tools and materials, and supplies of tools and materials, respectively, have a significant impact on the number of patients, accounting for 23.4% of the variable effect. The remaining influence is due to other factors that were not examined.*

**Keywords:** Budget management, performance, public health center

#### **Article Info:**

Received: 2 Maret 2022 | Revised form: 18 Maret 2022 | Accepted: 22 April 2022 | Published online: Desember 2022

## PENDAHULUAN

Kemunculan Covid-19 di awal tahun 2020 mengejutkan masyarakat sehingga menimbulkan kepanikan dan mengancam kesehatan masyarakat.<sup>1</sup> Puskesmas berperan penting menjadi fasilitas primer kesehatan.<sup>2</sup> Derajat kesehatan yang lebih baik dan merata dapat ditinjau dari perubahan paradigma nasional menuju pertumbuhan pembangunan yang menjadi peluang di era Reformasi saat ini.<sup>3</sup> Perubahan cara pandang tersebut dipahami, selain lain, melalui strategi kemandirian daerah dan keseimbangan moneter fokal dan teritorial yang diarahkan dalam satu paket peraturan, khususnya Peraturan No. 22 tahun 1999 berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>4</sup> Konsep kebijakan otonomi memberikan kewenangan dan kepercayaan bagi Puskesmas untuk mengkaji biaya belanja sendiri agar guna terlaksananya kegiatan kesehatan di Puskesmas.<sup>5</sup>

Pelayanan publik dalam hal ini puskesmas haruslah mampu terbuka dalam melakukan proses *planning*, *implementation*, dan *execution* biaya belanja yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Dengan menerapkan prinsip yang akuntabel, terbuka, efektif dan efisien akan membuat masyarakat yakin dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pelayanan publik.<sup>7</sup> Sehingga pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat dihasilkan dari kinerja keuangan organisasi publik tersebut di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Menurut kajian awal, adalah bagaimana mengkaji pengelolaan keuangan Puskesmas Abeli

karena pandemi Covid-19 telah mengubah banyak program kerja puskesmas sehingga berdampak pada kinerja keuangan puskesmas. Motivasi di balik penelitian ini adalah untuk memutuskan rencana pengeluaran di puskesmas terkait tingkat keuangan, kemampuan dan kelangsungan hidup.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian evaluasi adalah jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran atau membantu membuat keputusan.<sup>9</sup> Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Nambo. pada bulan Juni 2021. Subjek penelitian adalah Puskesmas Nambo, dan obyek kajiannya adalah rencana pengeluaran para eksekutif yang dilihat dari laporan keuangan masyarakat kesejahteraan Puskesmas Nambo Tahun 2019-2021. Pengumpulan data melalui dokumentasi dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis regresi lebih jauh lagi, proporsi moneter mengingat nilai uang yang signifikan; khususnya ekonomi, efisien, dan tingkat efektifitas.

## HASIL

Pengelolaan anggaran puskesmas yang dikur berdasarkan *value for money* yakni sebagai berikut.

**Tabel 1. Pengelolaan Anggaran Puskesmas Nambo Tahun 2019-2021 berdasarkan *Value of Money***

<i>Value for money</i>	%
Ekonomi	92,46
Efisien	131,90
Efektifitas	118,90

*Sumber: Data Sekunder, 2021*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Puskesmas Nambo berdasarkan *value of money* didapatkan bahwa tingkat ekonomi dengan 92,46% berarti bahwa pengelolaan pengeluaran anggaran ekonomis. Berdasarkan tingkat efisien dengan 131,90% berarti bahwa pengelolaan pengeluaran anggaran tidak efisien. Dan berdasarkan tingkat efektifitas dengan 118,90% berarti pengelolaan pendapatan anggaran efektif.

**Tabel 2. Hasil Uji t (parsial) dan uji F (Fisher)**

Variabel	t-hitung	Fisher
Stokobt	-0,642	$p = 0,075$
Altkes	1,135	
Altgigi	-2,735	
Allab	-1,419	

Sumber: data sekunder, 2021

Berdasarkan pada tabel 2, memperlihatkan bahwa persediaan obat tidak memiliki pengaruh bagi jumlah pasien karena diperoleh nilai t hitung sebesar -0,642 lebih kecil dari t tabel 1,306. Fakta bahwa variabel persediaan alat dan bahan medis memiliki nilai t hitung 1,135 lebih rendah dari nilai t tabel 1,306 menunjukkan bahwa persediaan alat dan bahan medis tidak mempunyai pengaruh bagi jumlah pasien. Fakta bahwa variabel alat dan bahan kedokteran gigi memiliki nilai t hitung -2,735 dan nilai t tabel 1,306 menunjukkan bahwa tersedianya alat dan bahan untuk pelayanan gigi mempunyai pengaruh bagi jumlah pasien. Fakta bahwa variabel bahan dan alat laboratorium memiliki nilai t hitung -1,419 lebih besar dari nilai t tabel 1,306 menunjukkan bahwa persediaan bahan dan alat laboratorium berpengaruh terhadap jumlah pasien.

Hasil uji terukur dengan uji f (Fisher) didapatkan nilai F determinan sebesar 2,363

dengan arti 0,075. Model regresi dengan variabel bebas persediaan obat, persediaan alat dan bahan medik, persediaan alat dan bahan kedokteran gigi, dan persediaan alat dan bahan laboratorium berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pasien karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,10 (0,075).

Metode untuk menentukan proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah koefisien determinasi. Pada penelitian ini, uji  $R^2$  memberikan hasil dengan nilai 0,234. Hal ini membuktikan yakni banyaknya pasien akibat dari pengaruh tersedianya obat-obatan, alat yang lengkap untuk pelayanan gigi dan kelengkapan fasilitas kesehatan dan persediaan bahan sebesar 23,4%, sedangkan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh variabel yang berbeda yang tidak dianalisis dalam penelitian ini tinjauan analisis.

## PEMBAHASAN

Anggaran publik adalah rencana uang yang terdiri dari seberapa banyak jumlah yang sesuai rencana dan cara untuk mendapatkannya sebagai alat dalam melakukan pembayaran.<sup>10</sup>

Tingkat penghematan dari pengeluaran pelayanan kesehatan diukur dengan tingkat ekonomi.<sup>11</sup> Pada tahun 2020, Puskesmas Nambo akan memiliki tingkat ekonomi sebesar 92,46%, yang berarti dapat menggunakan sumber input sesedikit mungkin dan menghindari pengeluaran uang yang tidak diperlukan.

Rasio kontribusi organisasi sektor publik terhadap output sektor diukur dengan efisiensi. Puskesmas Nambo tidak dapat mampu menjadikan "input" terendah untuk mencapai "output" tertentu

pada tahun 2020 karena tingkat efisiensinya tidak efisien (131,90 %). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan biaya dan atau subsidi yang didapatkan puskesmas yang bersumber dari pemerintah untuk puskesmas tidak sama dari jumlah uang yang dihasilkan dari puskesmas.

Tingkat efektivitas organisasi sektor publik diukur dalam kaitannya dengan target pendapatan untuk sektor tersebut. Tingkat efektivitas Puskesmas Nambo pada tahun 2020 (118,90 %) berarti tingkat pencapaiannya jauh lebih tinggi dari target. Jumlah pasien tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari fluktuatif pasokan obat dan peralatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan perbekalan dan alat kesehatan Puskesmas Nambo tidak berpengaruh terhadap jumlah pasien yang berkunjung atau berobat ke sana. Jumlah pasien secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan persediaan dan peralatan gigi yang berfluktuasi. Artinya, kesediaan adanya alat dan bahan pelayanan gigi stok alat dan bahan kedokteran gigi mampu memiliki pengaruh bagi banyaknya pasien yang mencari pengobatan di Puskesmas Nambo.

Jumlah pasien secara signifikan dipengaruhi oleh fluktuasi persediaan perlengkapan dan peralatan laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasien yang berkunjung atau berobat ke Puskesmas Nambo dapat dipengaruhi oleh ketersediaan alat dan perlengkapan laboratorium. Menurut penelitian Soakakone, pola pengelolaan keuangan di setiap Puskesmas memiliki tujuan sebagai dasar dalam pemberian pelayanan paripurna yang terbuka dan menjaga keadilan, kepatuhan, dan manfaat sejalan dengan

praktik bisnis yang sehat. dalam pikiran. Hal ini dilakukan dalam upaya membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. daerah yang penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah.<sup>12</sup> Berbeda dengan temuan penelitian lain yang menjelaskan bahwa personel yang tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidang akuntansi dan/atau keuangan melakukan manajemen keuangan dan sistem informasi akuntansi, personel yang telah mengikuti pelatihan akuntansi dipekerjakan. Pada saat operasionalisasi puskesmas semakin berkembang, tenaga kerja khusus yang menangani akuntansi harus segera disiapkan.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Manajemen dan kinerja anggaran Puskesmas Nambo secara keseluruhan memuaskan. Anggaran yang dikelola mampu memberikan kinerja dalam pencapaian tujuan Puskesmas. Namun disisi lain tidak adanya subsidi Pemerintah berakibat pada tidak efisiennya kondisi Puskesmas Nambo dan hanya 23,4% yang memberikan pengaruh agar masyarakat mau datang kembali ke Puskesmas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. F. Yanti dan KA Sukma. Gambaran Perilaku Berisiko Siswa di Kota Kendari Saat Pandemi Covirus 19 Tahun 2020; *Miracle Journal of Public Health (MJPH)*.2020; 3(2): 206-214.
2. Akbar MI, Alwi M, Thaha R. Peta Kebutuhan Dokter Umum Berdasarkan Beban Kerja

- untuk Mencapai Derajat Pelayanan Kesehatan Optimal di Puskesmas Se-Kabupaten Muna. *Health JST* 2017; 1(3) : 291-298.
3. Akbar MI, Risky S. Hubungan Kepuasan Pasien Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara dengan Kecepatan Memperoleh Pelayanan, Sikap Tenaga Kesehatan. 2020; *Miracle Journal of Public Health (MJPH)* 3(1): 11-17.
  4. Kementrian Kehakiman dan Undang-Undang Menteri HAM No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jakarta; 2004.
  5. Fahrudin M, Halim A, Hamid M. Analisis Tingkat Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Realisasi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo; 2017.
  6. Rizky S, Akbar MI. M. I. Akbar Abeli Kesmas "Kajian Penyebab Tunggakan Pembayaran Iuran JKN KIS di Wilayah Kerja Kota Kendari" Tim redaksi. *Des* 2019;1(1):34.
  7. Yayasan Penabulu. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah): Tinjauan Pengelolaan Keuangan Jakarta selatan: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan RI; 2017.
  8. Winarwati I, Rusdiana E. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan. 2015; 4(2):397-415.
  9. Firdaus KK, Wondabio LS. Wondabio LS, Firdaus KK. Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Analisis Iuran dan Pengeluaran Kesehatan Jurnal ASET (Research Accounting) 2019;11(1):58-147.
  10. Mardiasmo D., Akuntansi untuk sektor publik. Yogyakarta: Andi; 2009.
  11. Akbar, M. I. Analysis Of The Needs Of General Practitioners In Public Health Centers Using Health Workload Method. *Public Health of Indonesia*. 2020, 6(2), 63-9.
  12. Soakakone,M & Wafumilena, E. Evaluasi Pola Pengelolaan Data Keuangan BLUD PKM Pekalongan Melalui Sistem  *Holding*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: Jkki*. 2019 Volume 08 No. 01 Hal 18-27.
  13. Sabardiman,K & Afrizal. Evaluasi dampak perubahan berbasis BLUD dalam pengelolaan keuangan puskesmas di daerah. *Jurnal Aksi* 2020. Jilid. 7 No.2. Hal 23-31.